

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa - desa di Indonesia memiliki peranan penting menjadi cikal bakal lahirnya peradaban kota pada hari ini (Jamaludin, 2015). Desa juga mengambil peranan yang krusial dalam mencapai tujuan pembangunan nasional atas peranannya menjadi agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau sasaran riil kelompok yang hendak disejahterakan (Ramadana et al., 2013). Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2023 jumlah desa di Indonesia mencapai 83.971 (“Jumlah Desa / Kelurahan Menurut Provinsi, 2023,” 2023), ribuan desa ini dapat menjadi penggerak ekonomi di Indonesia melalui berbagai potensi ekonominya dalam berbagai sektor seperti pertanian, peternakan, perikanan, industri, dan sumber daya manusia (Jamaludin, 2015). Sebagai upaya penguatan perekonomian desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi dengan pengelolaan sumber daya desa agar menjadi efektif dan berkelanjutan (Sayuti, 2011). BUMDes bertujuan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan potensi desa melalui berbagai unit usaha. Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMDes memiliki berbagai tantangan seperti keterbatasan dalam hal manajemen, akses pada teknologi, serta kemampuan untuk mengelola dan melaporkan kinerja dengan sistem yang transparan dan akuntabel.

Aspek yang dapat menjawab tantangan dan keterbatasan BUMDes agar lebih efisien dan akuntabel salah satunya ialah dalam peningkatan teknologi, sebagaimana dalam penelitian (Negoro, 2018) yang menjelaskan bahwa inovasi BUMDes ialah dengan pemberdayaan ekonomi rakyat dengan menerapkan teknologi yang dapat membantu bisnis. Yang dimaksud efisien di sini ialah mampu menjadi fleksibel dalam menghadapi perubahan yang mendukung kemajuan dari badan usaha (Ferrani, 1998). Selain itu, yang dimaksud akuntabel yaitu dapat memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja kepada pihak lain

(Tjokroamidjojo, 2000). Efisiensi dan akuntabilitas dalam organisasi BUMDes ini dapat dilakukan dengan penggunaan teknologi informasi.

Banyak organisasi kecil atau usaha kecil yang masih memiliki masalah mendasar yang sama dalam hal teknologi seperti pada kualitas perangkat lunak yang buruk, kurang pelatihan IT, serta tidak dapat menghubungkan IT dengan nilai bisnis (Riemenschneider et al., 2003). Hambatan - hambatan seperti paparan Riemenschneider tersebut juga ada pada organisasi BUMDes. Kebanyakan BUMDes masih mengandalkan sistem manual dalam pengelolaan administrasi dan keuangannya, hal ini sering kali menyebabkan tidak efisien, kesalahan dalam pencatatan, dan minim transparansi (Sihabudin, 2019), permasalahan tersebut tentu dapat menimbulkan ketidakefektifan dalam proses bisnis operasional maupun non-operasional yang ada di BUMDes. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam bidang manajemen bisnis dan TI semakin memperburuk situasi ini (Budiarto et al., 2018). Dengan terbatasnya kemampuan SDM tentunya dapat menghambat kemampuan BUMDes untuk berkembang dalam mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Sebagai langkah untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Pusat, melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 136 tahun 2022, telah menetapkan kebijakan peningkatan efisiensi pengelolaan dana desa yang bertujuan memastikan pengelolaan dana desa secara efektif, transparan, akuntabel, dan mendorong penggunaan TI.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan utama BUMDes yaitu dengan menggunakan strategi arsitektur *enterprise* sistem informasi terintegrasi. Hal ini sejalan dengan penelitian (Suarezsaga, 2016) yang melakukan perencanaan strategis sistem informasi untuk mengoptimalkan pelayanan publik yang selaras visi dan misi desa. Analisis ini menggunakan pemodelan *enterprise architecture* dengan metode TOGAF ADM yang meliputi perancangan *business architecture, data architecture, application architecture, technology architecture*, serta peluang dan solusinya. Penelitian serupa dilakukan oleh (Nugroho, 2012) yang menggunakan sistem enterprise pada RSIA Andini. Penggunaan sistem *enterprise* metode TOGAF mampu mengatasi masalah pengembangkan program di organisasi kesehatan (RSIA Andini) yang fungsi bisnisnya masih manual dan

belum ada standarisasi, sehingga proses yang ada menjadi kurang efektif dan efisien. Untuk mengatasi masalah tersebut solusi dalam penelitian tersebut ialah memberikan perbaikan pada proses bisnis *existing* dan penyusunan arsitektur *enterprise* dengan TOGAF.

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) sendiri adalah prosedur perencanaan dan desain terstruktur dan lengkap untuk praktik manajemen dan arsitektur *enterprise*. TOGAF digunakan untuk mendefinisikan, mendeskripsikan, dan mengelola infrastruktur TI dalam suatu organisasi (Hornford et al., 2022). TOGAF juga memberikan saran yang komprehensif dan terstruktur bagi organisasi untuk merencanakan arsitektur TI mereka, serta mendorong implementasi dan sistem manajemen arsitektur yang tepat. Melalui TOGAF, suatu organisasi juga dapat memastikan bahwa investasi dalam bidang teknologi dapat selaras dengan strategi bisnisnya.

Dalam organisasi seperti BUMDes pemanfaatan TI maupun arsitekturnya dapat mengoptimalkan efisiensi operasional serta memastikan transparansi laporan keuangan dan kegiatan usaha (Hastriyandi & Munandar, 2018). Penerapan Sistem Informasi (SI) dengan arsitektur *enterprise* yang bekerja secara terintegrasi dapat membantu pengelola suatu organisasi untuk memantau kinerja secara *real-time*, mampu mengidentifikasi masalah dengan lebih cepat, dan dapat memberikan solusi atas suatu permasalahan berdasarkan data (Jaffe et al., 1991). Tentu keberhasilan penerapan TI dalam organisasi BUMDes bergantung pada hubungan yang saling bersinergi antara pemerintah desa dan pemerintah pusat. Regulasi pemerintah pusat melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa PDT) yang menyediakan dukungan teknis, pendanaan, dan regulasi yang diperlukan untuk implementasi TI tingkat desa. Sementara itu, tugas pemerintah desa ialah memastikan bahwa kebijakan dan program dari pemerintah pusat diimplementasikan dengan baik sesuai kebutuhan masyarakat lokal (desa) (Wahyudi, 2016). Sinergi ini penting untuk menciptakan ekosistem yang lebih kondusif untuk penerapan sistem informasi yang terintegrasi dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat desa dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Christina & Dahlan, 2017).

Untuk menerapkan SI yang terintegrasi, tentunya sebagai langkah awal dibutuhkan rancangan arsitektur *enterprise* SI yang baik seperti TOGAF guna mengakomodasi berbagai kebutuhan operasional dan manajerial BUMDes (Widadi et al., 2021), hal ini dapat menjadi pedoman bahwa semua komponen sistem dapat bekerja secara harmonis dan efisien. Arsitektur SI disini terdiri dari (1) perancangan arsitektur jaringan perangkat lunak, (2) perangkat lunak (aplikasi), dan (3) basis data yang saling terhubung guna mendukung jalannya berbagai fungsi bisnis seperti inventaris, manajemen keuangan, penjualan, dan pembuatan laporan. Dengan arsitektur SI dan TI yang terintegrasi tentunya akan dapat membantu BUMDes dalam menjalankan proses bisnisnya secara *real-time* dan memungkinkan pengambilan keputusan secara lebih cepat dan lebih tepat (Santoso & Affandi, 2016). Tentunya, integrasi ini juga akan mampu memaksimalkan potensi TI dalam mendukung operasional BUMDes agar lebih efisien, akuntabel, dan mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

Kebutuhan mengenai penelitian yang mendalam terkait strategi peningkatan akuntabilitas, dan efektivitas BUMDes tentu menjadi semakin penting sejalan dengan tantangan pengelolaan dan perkembangan proses bisnis BUMDes di Indonesia. Saat ini, masih terdapat gap akan pemahaman, implementasi, dan pengelolaan arsitektur sistem informasi dalam kegiatan / proses bisnis yang dilakukan oleh BUMDes. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi inovatif yang dapat diterapkan pada BUMDes. Penelitian ini juga menganalisis peran Kemendesa PDT dalam memberikan dukungan teknis yang dapat meningkatkan kinerja BUMDes. Dengan adanya evaluasi praktik proses bisnis yang ada dan penyusunan strategi yang komprehensif, penelitian ini akan didapatkan rekomendasi yang praktis dan aplikatif bagi BUMDes. Melalui paparan tersebut, judul penelitian ini ialah “Strategi Peningkatan Akuntabilitas dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Menggunakan Arsitektur *Enterprise* dengan Kerangka Kerja TOGAF”.

Kebutuhan mengenai penelitian yang mendalam terkait strategi peningkatan akuntabilitas, dan efektivitas BUMDes tentu menjadi semakin penting sejalan dengan tantangan pengelolaan dan perkembangan proses bisnis BUMDes di Indonesia. Saat ini, masih terdapat gap akan pemahaman, implementasi, dan

pengelolaan arsitektur sistem informasi dalam kegiatan / proses bisnis yang dilakukan oleh BUMDes. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan memberikan solusi inovatif yang dapat diterapkan pada BUMDes. Penelitian ini juga menganalisis peran Kemendesa PDT dalam memberikan dukungan teknis yang dapat meningkatkan kinerja BUMDes. Dengan adanya evaluasi praktik proses bisnis yang ada dan penyusunan strategi yang komprehensif, penelitian ini akan didapatkan rekomendasi yang praktis dan aplikatif bagi BUMDes. Melalui paparan tersebut, judul penelitian ini ialah “Strategi Peningkatan Akuntabilitas dan Efektivitas Badan Usaha Milik Desa Menggunakan Arsitektur *Enterprise* dengan Kerangka Kerja TOGAF”.

1.2 Rumusan masalah

Berikut beberapa poin penting untuk merumuskan masalah dari penjelasan latar belakang yang telah dijelaskan dalam menunjang penelitian ini yang terdiri dari:

1. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh BUMDes dalam manajemen dan akses terhadap sistem informasi mempengaruhi akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan BUMDes?
2. Bagaimana hubungan sinergis antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat, khususnya Kemendesa PDT dapat mendukung implementasi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas BUMDes?
3. Bagaimana strategi arsitektur *enterprise* sistem informasi terintegrasi dapat meningkatkan transparansi, efisiensi operasional dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini diperlihatkan pada beberapa poin yang terdiri dari:

1. Menjawab tantangan dalam manajemen dan akses teknologi yang dihadapi BUMDes yang mempengaruhi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan BUMDes.
2. Menjawab dan menghasilkan konsep hubungan sinergis antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Pusat, khususnya Kemendesa PDT dapat mendukung implementasi strategi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas distribusi data dan informasi terkait BUMDes.

3. Menghasilkan rekomendasi solusi konsep arsitektur sistem informasi terintegrasi untuk menjawab kebutuhan dalam merencanakan strategi peningkatan efektivitas dan akuntabilitas BUMDes yang dapat terintegrasi dengan Kemendesa PDT.
4. Menghasilkan penilaian dari solusi konsep arsitektur sistem informasi terintegrasi peningkatan efektivitas dan akuntabilitas BUMDes dengan Kemendesa PDT.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi BUMDes:
 - a. Sebagai sarana penghubung antara tingkat Pemerintah Pusat yakni Kemendesa PDT dengan tingkat Desa yakni BUMDes dalam mendistribusikan data dan informasi lebih cepat.
 - b. Memberikan panduan dan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kapasitas manajemen BUMDes melalui adopsi teknologi informasi dengan menerapkan arsitektur sistem informasi terintegrasi yang baik.
2. Bagi Pemerintah Desa:
 - a. Penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana pemerintah desa dapat lebih efektif berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan BUMDes.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun dan memperbaiki kebijakan lokal yang mendukung peningkatan kinerja BUMDes, termasuk dalam aspek regulasi, pendanaan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bagi Pemerintah Pusa (Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal):
 - a. Penelitian ini akan memberikan data dan informasi yang dapat digunakan oleh Kementerian untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta mengembangkan kebijakan baru yang lebih tepat sasaran dalam mendukung BUMDes.

- b. Dengan mengetahui tantangan dan kebutuhan yang dihadapi BUMDes, Kementerian dapat menyediakan pendampingan dan dukungan teknis yang lebih efektif dan sesuai dengan kondisi lapangan.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti:
- a. Penelitian ini akan menambah khazanah literatur mengenai pengelolaan BUMDes dan penerapan teknologi informasi dalam konteks pembangunan desa di Indonesia. Ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Temuan dari penelitian ini dapat membuka peluang untuk penelitian lanjutan yang lebih mendalam mengenai strategi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan BUMDes.
5. Bagi Masyarakat Desa:
- a. Dengan peningkatan kinerja dan akuntabilitas BUMDes, diharapkan masyarakat desa dapat merasakan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan, terbukanya lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup.
 - b. Penelitian ini juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan BUMDes, sehingga tercipta lingkungan yang lebih demokratis dan transparan di tingkat desa.

1.5 Batasan masalah

Batasan dan ruang lingkup dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian ini hanya terbatas pada BUMDes Mitra Mandiri Sejahtera Jatimulyo Provinsi Lampung dan Kemendesa PDT yang berlokasi di wilayah Jakarta Selatan.
2. Penggunaan kerangka kerja TOGAF dibatasi hanya menggunakan *preliminary phase, architecture vision, business architecture, information system architecture, technology architecture, dan opportunities and solution*.